

Peran Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Pembangunan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Elisabet Apriliani Poso¹, Mariane Kauk², Sofia Metilda Oldin³, Maria Fransiska Ema Koten⁴, Antonio Orlando Suban Witak⁵, Adelheid Elisabet Loda⁶, Adrianus Ketmoen⁷
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang^{1,2,3,4,5,6,7}, desiadelheid@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan efektivitas perencanaan pembangunan partisipatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Timur (NTT), Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui tinjauan sistematis literatur, penelitian ini mengeksplorasi kerangka perencanaan partisipatif, pemberdayaan sosial, dan pembangunan ekonomi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat di berbagai tingkat pemerintahan meningkatkan relevansi program, efisiensi anggaran, dan modal sosial, sekaligus memberdayakan kelompok rentan meskipun terdapat kendala seperti kapasitas pemerintah yang terbatas dan hambatan budaya. Studi ini merekomendasikan peningkatan kapasitas, pengembangan infrastruktur, dan kebijakan inklusif untuk mengoptimalkan manfaat perencanaan partisipatif dalam kemajuan ekonomi daerah. **Kata Kunci** : perencanaan pembangunan partisipatif, pertumbuhan ekonomi inklusif, pemberdayaan sosial, Nusa Tenggara Timur, pembangunan berkelanjutan

ABSTRACT

This study aims to examine the role and effectiveness of participatory development planning in promoting inclusive and sustainable economic growth in East Nusa Tenggara (NTT), Indonesia. Employing a qualitative method through a systematic review of literature, the study explores frameworks of participatory planning, social empowerment, and local economic development. The findings reveal that involving local communities at various administrative levels enhances project relevance, budget efficiency, and social capital, while empowering vulnerable groups despite challenges such as limited government capacity and cultural barriers. The study recommends capacity building, infrastructural development, and inclusive policy-making to maximize the benefits of participatory planning for regional economic advancement.

Keywords: *participatory development planning, inclusive economic growth, social empowerment, East Nusa Tenggara, sustainable development*

Naskah diterima: 11 November 2025, direvisi: 04 Maret 2026, diterbitkan: 11-Mei-2025

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pendekatan strategis yang semakin mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Provinsi NTT memiliki karakteristik geografis yang unik

berupa rangkaian pulau dengan kondisi sosial-ekonomi yang beragam dan menghadapi berbagai keterbatasan terkait akses infrastruktur dan sumber daya manusia. Dalam konteks ini, perencanaan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat menjadi sangat penting agar pembangunan yang dirancang tepat sasaran dan

berkelanjutan. Pendekatan partisipatif memungkinkan masyarakat tidak hanya menjadi objek dari pembangunan, tetapi juga subjek yang ikut menentukan arah kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga hasil pembangunan lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Pemberdayaan masyarakat melalui perencanaan partisipatif terbukti dapat memperkuat modal sosial dan meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya lokal, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Di NTT, pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif sudah melekat melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat desa hingga provinsi. Melibatkan masyarakat dalam musrenbang ini memperlihatkan potensi tinggi dalam mengidentifikasi prioritas pembangunan yang tepat serta meningkatkan rasa memiliki atas hasil pembangunan. Selain itu, keterlibatan masyarakat juga berkontribusi dalam mengurangi konflik sosial dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan. Berbagai penelitian yang dilakukan di Indonesia dan khususnya di NTT menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif memiliki dampak positif pada pembangunan ekonomi lokal. Misalnya, peningkatan efisiensi pemanfaatan anggaran, optimalisasi sumber daya lokal, serta pemberdayaan kelompok rentan seperti perempuan dan komunitas adat, semuanya berkontribusi dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan pendekatan ini juga menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah, hambatan birokrasi, serta norma sosial dan budaya yang membatasi partisipasi perempuan dan kelompok marginal. Secara teoritis, perencanaan pembangunan partisipatif berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan dan demokrasi partisipatif yang menekankan inklusivitas dan keadilan sosial. Model bottom-up ini memastikan proses pembangunan berjalan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar mengambil keputusan dari tingkat atas.

Kerangka konseptual perencanaan partisipatif mencakup partisipasi aktif masyarakat, transparansi, akuntabilitas, pemberdayaan kelompok rentan, dan evaluasi berkelanjutan, yang seluruhnya harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya lokal di NTT agar efektif dan bermanfaat bagi pembangunan ekonomi. Pemahaman dan penerapan perencanaan pembangunan partisipatif di NTT bukan hanya penting sebagai strategi teknis pembangunan, tetapi juga sebagai kontribusi signifikan dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.

KAJIAN LITERATUR

Perencanaan pembangunan partisipatif adalah pendekatan strategis yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembangunan, bukan hanya sebagai objek. Pendekatan ini berasal dari paradigma bottom-up yang mengedepankan penyelarasan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah (Abe, 2005). Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan relevansi hasil pembangunan dan keberlanjutannya dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berkontribusi dalam perumusan program tanpa tekanan sosial, serta membangun dialog terbuka dan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat (Tentang et al., 2013).

Perencanaan partisipatif juga dapat memperkuat modal sosial dan meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya lokal sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkeadilan sosial (Amheka, 2020).

Dalam konteks Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimana terdapat tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, dan dinamika sosial budaya yang kompleks, perencanaan partisipatif menjadi sangat penting untuk memastikan pembangunan yang tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan (Nur Effendi et al., 2025).

Hambatan pelaksanaan umumnya berupa keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah,

tata kelola birokrasi yang kaku, hambatan norma sosial budaya termasuk patriarki, dan kendala geografis yang mempersulit akses dan partisipasi masyarakat secara menyeluruh (Chika et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literature review untuk menganalisis peran perencanaan pembangunan partisipatif dalam pembangunan ekonomi di Nusa Tenggara Timur. Data diperoleh dari kajian jurnal, buku, dan dokumen relevan terkait perencanaan partisipatif dan pembangunan ekonomi. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama, hambatan, serta strategi penguatan perencanaan partisipatif berdasarkan berbagai sumber teori dan temuan empiris. Pendekatan ini dipilih untuk mendalami kerangka teoretis dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung pemahaman konteks NTT.

PEMBAHASAN

Konsep Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan suatu pendekatan perencanaan pembangunan yang mengedepankan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembangunan. Konsep ini berakar pada paradigma pembangunan bottom-up, yang berusaha menyelaraskan antara aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pembangunan yang dibuat pemerintah. Dalam praktiknya, sebagaimana dijelaskan di berbagai literatur dan penelitian, perencanaan partisipatif menggabungkan dua proses penting, yaitu proses perencanaan dari bawah ke atas (bottom-up) dan dari atas ke bawah (topdown) sehingga ketepatan dan keberlanjutan pembangunan dapat diwujudkan. Sifat utama dari perencanaan partisipatif adalah berorientasi pada kepentingan masyarakat sebagai penerima manfaat pembangunan. Hal ini menuntut

adanya ruang yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, serta berkontribusi dalam perumusan program pembangunan tanpa adanya hambatan atau tekanan sosial. Dialog yang terbuka dan sikap saling percaya antara pemerintah dan masyarakat menjadi fondasi utama keberhasilan proses ini. Dengan demikian, perencanaan partisipatif tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga merupakan upaya nyata untuk menjembatani kebutuhan rakyat dengan kepentingan pemerintah. Perencanaan partisipatif memberikan beberapa dampak penting, antara lain mengurangi peluang manipulasi dalam penyusunan rencana pembangunan, meningkatkan legitimasi hasil perencanaan, serta meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat dalam pengelolaan pembangunan (Abe (2005)). Implikasi praktisnya, ketika masyarakat terlibat dalam setiap tahap perencanaan, mereka akan lebih memahami program-program yang akan dilaksanakan dan terdorong untuk turut serta aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan tersebut.

Selain aspek partisipasi itu sendiri, konsep ini juga menekankan pentingnya sinergi antara berbagai pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat, LSM, maupun sektor swasta sehingga posisi dan peran masing-masing pihak dapat saling melengkapi demi keberhasilan pembangunan. Proses perencanaan harus bersifat dinamis dan berkelanjutan agar tetap relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kondisi sosial ekonomi yang berubah-ubah. Kerangka kerja perencanaan partisipatif biasanya melibatkan beberapa tahapan, yakni tahap persiapan (penunjukan tim fasilitator), penggalian aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah tingkat dusun, RW, hingga desa, penyusunan rencana oleh lembaga perencana, dan pengesahan rencana sebagai produk hukum yang mengikat pelaksanaan pembangunan. Dengan proses yang terstruktur namun fleksibel ini, partisipasi masyarakat dapat terwadahi secara maksimal, menciptakan rasa memiliki atas pembangunan, serta mendorong pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Kondisi Sosial Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dikenal sebagai wilayah dengan karakteristik sosial ekonomi yang kompleks dan memiliki tantangan pembangunan yang signifikan. Geografi NTT yang terdiri dari banyak pulau kecil dan terpencar menyebabkan hambatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Kondisi ini berdampak pada rendahnya pemerataan pembangunan dan akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur publik esensial.

Secara sosial, masyarakat NTT sangat heterogen dengan keberagaman budaya dan norma adat yang masih memegang peranan kuat dalam kehidupan sehari-hari. Norma patriarki yang dominan menyebabkan keterbatasan peran perempuan dalam pengambilan keputusan sosial dan ekonomi, yang berdampak pada peluang ekonomi mereka. Faktor ini menjadi salah satu isu penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kawasan tersebut. Dari sisi ekonomi, sebagian besar penduduk NTT masih bergantung pada sektor pertanian subsisten, perikanan tradisional, dan kerajinan tangan yang masih bersifat skala kecil dan kurang produktif. Tingkat kemiskinan di NTT juga termasuk yang tertinggi di Indonesia, dengan banyak wilayah yang belum berhasil keluar dari kemiskinan struktural dan ketimpangan sosial-ekonomi. Infrastruktur jalan, listrik, dan jaringan komunikasi masih belum merata, sehingga membatasi laju pertumbuhan usaha dan investasi di daerah ini.

Kendala ini membuat kebutuhan akan perencanaan pembangunan yang responsif dan sesuai kebutuhan lokal menjadi sangat penting. Perencanaan yang tidak mempertimbangkan karakteristik sosial budaya dan kondisi ekonomi masyarakat berisiko gagal mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif yang melibatkan semua lapisan masyarakat, termasuk kaum rentan dan perempuan, sangat dibutuhkan agar pembangunan di NTT dapat diarahkan secara tepat dan efektif. Pemanfaatan mekanisme

partisipasi dalam proses perencanaan dapat memperkuat modal sosial dan mendorong kesadaran kolektif masyarakat dalam turut mengawasi dan memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai rencana. Hal ini sangat krusial untuk daerah seperti NTT, di mana keterbatasan sumber daya dan tantangan geografis menuntut efisiensi dan akuntabilitas tinggi dalam pengelolaan pembangunan. Kondisi sosial ekonomi NTT menuntut model pembangunan yang inklusif, adaptif, dan berbasis kebutuhan masyarakat lokal. Konsep perencanaan pembangunan partisipatif menawarkan kerangka strategis yang memungkinkan integrasi aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan pembangunan resmi, sehingga hasil pembangunan dapat lebih berkelanjutan, merata, dan berkeadilan sosial.

Peran Perencanaan Pembangunan Partisipatif dalam Pembangunan Ekonomi

Perencanaan pembangunan partisipatif memegang peranan sentral dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pemerintah dapat lebih akurat memahami kebutuhan dan potensi lokal yang beragam, sehingga program ekonomi yang disusun tidak hanya bersifat top-down tetapi benar-benar berbasis kondisi lapangan. Partisipasi masyarakat, khususnya dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di berbagai tingkatan mulai dari RT, dusun, desa hingga kecamatan dan provinsi, memungkinkan aspirasi warga terwakili dan memperoleh perhatian serius dalam alokasi anggaran dan sumber daya pembangunan. Di NTT, program-program pembangunan ekonomi yang difasilitasi dengan pendekatan partisipatif berhasil memberdayakan komunitas lokal terutama di sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan kerajinan khas daerah. Misalnya, Kabupaten Ngada menerapkan model partisipatif melalui program seperti Pelangi Desa dan Pelangi Kawasan yang seluruh dananya bersumber dari APBD setempat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan relevansi dan efektivitas program

pembangunan tetapi juga memperkuat rasa memiliki masyarakat atas hasilnya, sehingga mereka terdorong turut aktif dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Selain itu, perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung dapat meningkatkan distribusi manfaat pembangunan, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat adat, dan kelompok miskin. Keterlibatan aktif kelompok ini membantu mengurangi praktik marginalisasi dan memastikan pembangunan ekonomi di NTT bersifat merata dan berkeadilan. Perencanaan partisipatif juga mendukung pengembangan modal sosial yang krusial dalam memperkuat kapasitas kolektif masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial. Partisipasi Secara publik dalam perencanaan ekonomi di NTT memacu pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, meningkatkan transparansi alokasi anggaran daerah, dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholders lainnya dalam pencapaian target pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Hambatan dalam Pelaksanaan Perencanaan Partisipatif di NTT

Pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif di NTT menghadapi sejumlah hambatan yang bersifat struktural, kultural, dan teknis. Secara struktural, keterbatasan kapasitas aparatur desa dan kecamatan dalam memfasilitasi proses partisipasi menjadi kendala utama. Aparatur desa yang terbatas pengetahuan dan keterampilannya seringkali kurang mampu memfasilitasi musyawarah yang inklusif dan efektif, sehingga partisipasi masyarakat tidak optimal. Kendala birokrasi juga masih menjadi masalah, di mana prosedur perencanaan dan penganggaran daerah yang panjang dan mekanistik kadang membatasi fleksibilitas proses partisipatif. Sistem hierarkis yang kaku dan kurang responsif terhadap masukan masyarakat dapat menurunkan motivasi partisipasi serta menyebabkan aspirasi masyarakat tidak sampai ke tingkat pengambilan keputusan. Selain hal-hal teknis, masalah budaya dan sosial turut menambah

kompleksitas pelaksanaan perencanaan partisipatif. Norma sosial yang patriarkis serta adat istiadat yang masih kental membatasi partisipasi perempuan dan kelompok marginal dalam musyawarah dan pengambilan keputusan pembangunan. Akibatnya, suara kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat sering kurang terakomodasi, sehingga potensi pembangunan yang inklusif belum sepenuhnya tercapai. Kondisi geografis NTT yang terdiri dari banyak pulau dan wilayah terpencil juga menyulitkan penyelenggaraan kegiatan perencanaan secara menyeluruh dan merata. Rendahnya aksesibilitas dan infrastruktur komunikasi membuat sejumlah masyarakat sulit dilibatkan secara optimal dalam proses musrenbang, sehingga penyerapan aspirasi menjadi tidak merata dan beberapa daerah tertinggal relatif kurang tersentuh program pembangunan. Hambatan-hambatan tersebut mempengaruhi efektifitas dan kualitas perencanaan partisipatif di NTT, sehingga diperlukan intervensi strategis untuk mengatasinya agar pembangunan ekonomi daerah benar-benar didasarkan pada kebutuhan dan potensi masyarakat lokal.

Strategi Penguatan Perencanaan Partisipatif di NTT

Untuk mengoptimalkan peran perencanaan pembangunan partisipatif dalam pembangunan ekonomi NTT, diperlukan strategi penguatan yang komprehensif dan kontekstual. Pertama, peningkatan kapasitas aparatur desa dan kecamatan sangat krusial. Pelatihan teknis fasilitasi musyawarah, pengelolaan data perencanaan, penggunaan teknologi informasi, dan penguatan tata kelola diperlukan agar proses partisipatif berjalan efektif dan inklusif. Kedua, pemerintah daerah harus memperkuat mekanisme inklusi, memastikan keterlibatan aktif perempuan, kelompok adat, dan masyarakat marjinal melalui kebijakan yang menghormati norma lokal sekaligus mendorong pemberdayaan kelompok-kelompok tersebut. Pendekatan ini dapat ditempuh melalui fasilitasi forum khusus, pelibatan lembaga adat dalam proses

perencanaan, dan kebijakan afirmatif untuk pemberdayaan perempuan. Ketiga, pengembangan infrastruktur komunikasi dan aksesibilitas di wilayah terpencil sangat penting untuk menjangkau daerah-daerah yang selama ini kurang terakses. Peningkatan sarana transportasi dan teknologi informasi memungkinkan proses pembelajaran dan partisipasi masyarakat menjadi lebih merata, serta mempercepat aliran informasi pembangunan. Keempat, untuk mengatasi kendala birokrasi dan prosedural, reformasi tata kelola perencanaan daerah yang menempatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan fleksibilitas sebagai pilar utama perlu diberlakukan. Penggunaan sistem informasi perencanaan berbasis online bisa mendukung efisiensi proses dan memberikan ruang partisipasi yang lebih luas dan mudah. Kelima, kolaborasi lintas sektor dan tingkatan pemerintahan serta antara pemerintah, masyarakat sipil, dan dunia usaha harus diperkuat untuk memastikan sinergi dan keselarasan dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini penting untuk menjamin bahwa hasil perencanaan partisipatif bukan hanya dokumen formal, tetapi benar-benar diimplementasikan dan memberi dampak positif bagi pembangunan ekonomi lokal. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut secara konsisten dan adaptif sesuai dinamika lokal, Provinsi NTT dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan partisipatif sehingga mendukung percepatan pembangunan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan sesuai visi pembangunan daerah dan nasional.

PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Perencanaan pembangunan partisipatif memiliki peranan krusial dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pendekatan ini memungkinkan masyarakat lokal untuk secara aktif terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga program pembangunan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Dengan mengatasi

keterbatasan kapasitas, hambatan birokrasi, serta tantangan sosial budaya melalui strategi strategis seperti peningkatan kapasitas aparatur, pengembangan infrastruktur, dan inklusi kelompok rentan, perencanaan partisipatif mampu meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pembangunan di NTT. Selain itu, perencanaan partisipatif memberikan dampak positif yang signifikan dalam penguatan modal sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta kesetaraan sosial, khususnya bagi kelompok perempuan dan komunitas adat.

Sebagai rekomendasi, pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terkait perlu terus meningkatkan kapasitas kelembagaan dan individu dalam memfasilitasi proses partisipasi masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan. Pengembangan teknologi informasi dan infrastruktur komunikasi harus menjadi prioritas untuk menjangkau wilayahwilayah terpencil agar proses perencanaan benar-benar merata. Pemerintah juga harus memperkuat mekanisme koordinasi lintas sektor dan memastikan adanya pelibatan aktif kelompok marginal serta pemantauan ketat terhadap jalannya implementasi program pembangunan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan partisipatif dapat berjalan optimal dan memberikan kontribusi maksimal terhadap percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi NTT secara menyeluruh.

REFERENSI

- Amheka, A. (2020). Memahami Pembangunan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Berbasis Energi Baru dan Terbarukan. *Tataloka*, 22(3), 428–436. <https://doi.org/10.14710/tataloka.22.3.428-436>
- Brata, J. T., Djauhar, A., Sufrianto, Jawiah, S., & Yuningsih, N. K. E. (2022). Model Perencanaan Partisipatif Masyarakat Desa Alebo Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 37–46. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i1.57>
- Chika, P. N., Natalia Siregar, G. D., Sinaga, K. M., & Ummah, A. (2025). Ketidaksetaraan Gender

- dalam Pembangunan Perdesaan dan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Nusa Tenggara Timur pada Periode Kepemimpinan Victor Laiskodat 2018. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(2), 12.
<https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.258>
- Efendi, Z. (2024). *Strategi Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan Daerah untuk Menghadapi Perubahan Iklim Global*. 1(4), 198–209.
- Erdiaw-Kwasie, M. O., & Acheampong, M. Y. (2018). Empowerment and community salience in multi-party collaboration: empirical lessons for development planning. *Development in Practice*, 28(7), 932–942.
<https://doi.org/10.1080/09614524.2018.1486805>
- Jayanegara, D. P., Farady Marta, R., & Isnaini, M. (2021). The Relationship between Participatory Communication and Social Capital on the Ecological Sustainability of Mangrove Ecotourism in Teluk Naga Village. *Jurnal Warta LPM*, 24(3), 545–557.
<http://journals.ums.ac.id/index.php/warta>
- Mustanir, A., & Yasin, A. (2018). Community Participation in Transect on Development Planning. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 8(2), 137.
<https://doi.org/10.26858/jiap.v8i2.7994>
- Maharani, A. H., Irwana, N., & Noviyanti, I. (2025). Penerapan Manajemen Strategi Melalui Evaluasi SWOT Pada CV MM Acing Jaya Di Pangkalpinang. *Holistic Journal of Management Research*, 10(1), 52-57.
<https://doi.org/10.33019/bc7q2y04>
- Nur Effendi, W., Devina Agustin Hake, S., & Rozikin, M. (2025). Sinkronisasi Perencanaan, Penganggaran dan Pengawasan: Peta Jalan Menuju Keberhasilan Pembangunan (Studi Pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur). *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 7(1), 124–139.
<https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i1.1151>
- Nur Ritonga, S. H., & Humaizi, H. (2021). Effectiveness Musrenbang's in the Development Planning Process in Medan's Denai District. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 11(2), 185–196.
<https://doi.org/10.31289/jap.v11i2.5614>
- Saputra, P. P., Aisyah, S., & Darmanto, D. (2021). Analisis Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Desa Pemekaran Sebagai Perwujudan Demokratisasi Ditingkat Lokal (Suatu Studi Pada Desa Pemekaran Di Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka). *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 6(1), 74.
<https://doi.org/10.24198/jwp.v6i1.32304>
- Tentang, S., Musrenbang, E., Muara, K., Kab, B., Kutai, K., & Enos, P. (2013). Perencanaan Pembangunan Partisipatif. *Jurnal Paradigma*, 2(1), 10–25.
- Wadu, L. B. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan Bidang Kebudayaan. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 15(2), 56–74.
<https://doi.org/10.21009/jimd.v15i2.8814>
- Wendi Suprpto Padang, & Kusmanto, H. (2019). Participative Planning in the Process of Arranging the Middle Term of. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 195–216.
- Wudianto, N. R., & Setiawan, T. (2024). Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Mekarsari Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(3), 176–181.

BIODATA PENULIS

Text artikel ditulis disini, text artikel ditulis disini, text artikel ditulis disini.

Elisabet Apriliani Poso, Mariane Kauk, Sofia Metilda Oldin, Maria Fransiska Ema Koten, Antonio Orlando Suban Witak, Adelheid Elisabet Loda, Adrianus Ketmoen